



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Inovasi SIMDA BMD: untuk Optimalisasi E-Government di BPKAD Kabupaten Ogan Ilir

Sholahuddin^{1*}, Kgs. M. Sobri², Slamet Widodo³, Sriati⁴

¹Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia, 07013682227996@student.unsri.ac.id

²Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia, kgsmsobri578@gmail.com

³Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia, slametwidodo30x2@gmail.com

⁴Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia, sriati@unsri.ac.id

*Corresponding Author: 07013682227996@student.unsri.ac.id

Abstract: *This study aims to examine how information technology is utilized in the management of Regional Government Assets (BMD) and its relevance to the development of e-government in Ogan Ilir Regency. The research method employed is a qualitative approach with literature review technique. The findings reveal various benefits and challenges in the implementation of SIMDABMD. The benefits include better recording, management, reporting, and monitoring of regional government assets, as well as improved public services. However, challenges such as limited human resources, technological infrastructure, budget constraints, data integration issues, data security, changes in bureaucratic procedures, and lack of technical support were identified. To promote the development of e-government and SIMDABMD, the Ogan Ilir Regency government needs to provide training on Information and Communication Technology (ICT) to enhance the competence of implementing bodies, improve the infrastructure related to e-government, and educate the public on the system itself to minimize human errors and other potential issues in regional asset management.*

Keywords: *Inovation, E-Government, SIMDABMD*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan bagaimana relevansinya terhadap pengembangan *e-government* di Kabupaten Ogan Ilir. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ialah pendekatan kualitatif dengan metode literatur review. Hasil penelitian menunjukkan berbagai manfaat dan hambatan dalam implementasi SIMDABMD. Manfaatnya meliputi pencatatan, pengelolaan, pelaporan, dan pemantauan barang milik pemerintah daerah yang lebih baik, serta peningkatan layanan publik. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, anggaran yang terbatas, masalah integrasi data, keamanan data, perubahan prosedur birokrasi, dan kurangnya dukungan teknis. Untuk mendorong pengembangan *e-government* dan SIMDABMD, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir perlu memberikan pelatihan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna mengembangkan kompetensi organ pelaksana, meningkatkan sarana

dan pra-sarana terkait *e-government*, serta mengedukasi masyarakat terkait system itu sendiri, guna meminimalisir terjadi *human error* dan problematika lainnya yang dapat muncul dalam proses manajemen aset daerah.

Kata Kunci: Inovasi, *E-Government*, SIMDABMD

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan terintegrasinya segala aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, informasi, sistem politik sampai aspek budaya (Pahludinm 2020). Terlepas dari dampak positif maupun negatif yang dibawa oleh era globalisasi, dengan adanya pengembangan teknologi informasi yang begitu pesat memaksa dunia untuk dapat beradaptasi dengan segala perubahan ada. Pemerintah, sebagai pihak yang berkewajiban untuk menjalankan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mau tidak mau harus dapat beradaptasi mengikuti perkembangan zaman.

Perkembangan teknologi informasi saat ini terus mengalami kemajuan pesat. Teknologi informasi tidak lagi dianggap sebagai elemen pelengkap dalam sebuah organisasi, melainkan telah bertransformasi menjadi aset penting yang strategis (Azeem et al., 2021). Organisasi berlomba-lomba untuk berinovasi dalam mengembangkan teknologi informasi karena fungsinya yang diharapkan dapat memberikan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi (Chege et al., 2020). Teknologi ini tidak hanya sekadar mendukung operasional, tetapi juga berperan penting dalam pengambilan keputusan dan arah kebijakan strategis organisasi (He et al., 2021).

Data yang dikumpulkan dari survei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa anggaran terbesar yang dikeluarkan oleh organisasi saat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi (Valle-Cruz et al., 2022). Teknologi informasi telah menjadi aset penting dalam mencapai tujuan organisasi serta menentukan kebijakan strategis (Marchiori et al., 2022). Merespons kemajuan teknologi informasi, pemerintah pusat mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong organisasi pemerintah untuk memberikan layanan publik berdasarkan prinsip keterbukaan (Androniceanu, 2021). Prinsip ini hanya dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang memungkinkan masyarakat mengetahui rencana pengembangan dan pengelolaan organisasi pemerintah, serta anggaran keuangan secara transparan (Bandy, 2023). Kebijakan pemerintah yang berfokus pada penerapan teknologi ini sering disebut sebagai *e-government* (McQuiston & Manoharan, 2021).

Konsep *e-government* hadir sebagai integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam layanan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas pelayanan publik. Implementasi *e-government* memungkinkan pemerintah memperbaiki pengelolaan administrasi, mempercepat birokrasi, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Ndou, 2004). Dengan adanya digitalisasi layanan, pemerintah dapat meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas, yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Heeks, 2006).

Agar dampak positif dari transformasi ini maksimal, *e-government* perlu diterapkan di setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, BMN didefinisikan sebagai semua barang yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Jannah & Widjajaatmadja, 2021). Untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan kondisi aset negara secara transparan, digunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) (Nuryati et al., 2020). Di tingkat

pemerintahan daerah, aplikasi SIMDA digunakan untuk memastikan manajemen aset dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Igirisa et al., 2022).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa manajemen aset daerah berperan penting dalam melindungi aset daerah. Studi oleh Adam & Thalib (2022) dan Ali et al. (2017) menemukan bahwa manajemen aset yang baik memiliki pengaruh positif dalam menjaga keamanan aset daerah. Hal ini juga didukung oleh kajian Febrianti et al. (2023) di Pemerintah Kota Medan, yang menekankan pentingnya pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset dalam pengamanan aset daerah. Selain itu, Firdausy (2018) dan Ishak (2022) juga menyimpulkan bahwa manajemen aset yang efektif secara signifikan dapat mempengaruhi keamanan aset daerah.

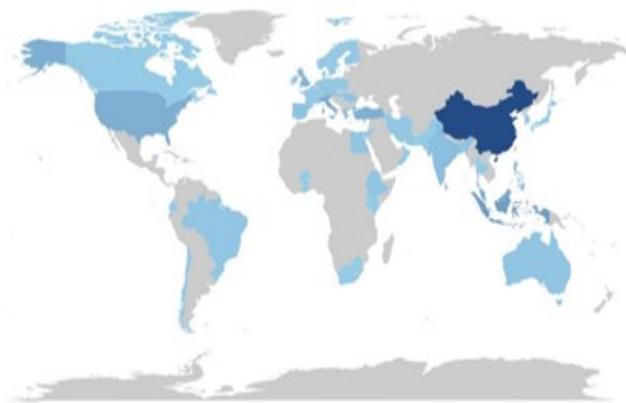
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode bibliometrik dengan perangkat lunak Biblioshiny untuk memetakan tren penelitian terkait Sistem Informasi Manajemen dan *e-Government* di Indonesia (Agnusdei & Coluccia, 2022; Moral-Muñoz et al., 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren topik penelitian yang telah dipublikasikan dan menemukan kebaruan penelitian dibandingkan penelitian sebelumnya. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi: (1) Pencarian data dari basis data Scopus menggunakan kata kunci "Sistem Informasi Manajemen" dan "e-government" yang menghasilkan 188 artikel; (2) Reduksi data dan pembuatan matriks jaringan; serta (3) Pembuatan WordCloud dan analisis produksi ilmiah berdasarkan negara.



Sumber : Diolah Penulis, 2024

**Gambar 1. Hasil Analisis Biblioshiny “wordCloud”
Manajemen Sistem Informasi dan e-Government**

Gambar 2 menunjukkan produksi ilmiah dari masing-masing negara berdasarkan afiliasi penulis artikel. Jumlah publikasi sebanding dengan intensitas warna pada peta produksi ilmiah suatu negara (Ribeiro et al., 2022). Lima negara dengan output ilmiah terbesar adalah China dengan 119 artikel, Indonesia 40 artikel, Italia 30 artikel, Malaysia 29 artikel, dan Amerika Serikat 26 artikel.



Sumber : Diolah Penulis, 2024

Gambar 2. Visualisasi Hasil Riset Negara di Dunia

Kemajuan teknologi abad ke-21 telah mengubah cara kita hidup, bekerja, serta berinteraksi, baik dengan sesama maupun dengan entitas pemerintah (Achmad, 2021). Tren sosial dan teknologi kini semakin mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelayanan, berkolaborasi dengan publik, serta membuka dan membagikan data demi mendorong inovasi (Magalhaes & Roseira, 2020). Tren ini menjadikan warga sebagai produsen informasi dan layanan pemerintah (Khine et al., 2021). Pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi (ICT) telah membuka peluang besar bagi pemerintah di seluruh dunia, namun juga membawa tantangan tersendiri (Banafaa et al., 2023). Setiap hari, pejabat pemerintah menghadapi tantangan seperti digitalisasi dokumen historis (Pandey & Kumar, 2020), hingga mengatasi masalah interoperabilitas antar repositori data dan komunikasi digital yang terus berkembang (Karanam et al., 2021). Hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang tidak memadai, kurangnya kerangka peraturan yang sesuai, format data yang berbeda-beda, rendahnya literasi digital, serta ketidakpastian dampak teknologi baru pada praktik kerja, menghambat modernisasi administrasi publik (Belyakova, 2021; Ramos et al., 2021).

Pengelolaan dan pengamanan aset daerah memiliki peran penting dalam administrasi pemerintahan, terutama di tingkat daerah seperti Kabupaten Ogan Ilir (Gavrikova et al., 2020). Aspek ini menjadi krusial karena mencakup berbagai dimensi yang relevan. Manajemen aset daerah tidak hanya terkait dengan aspek keuangan, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara optimal (Zamdedy, 2024). Aset daerah, seperti inventaris, kendaraan, dan peralatan, merupakan sumber daya bernilai tinggi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan yang baik (Setiawan et al., 2024). Pengelolaan aset yang efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi potensi kerugian atau kerusakan yang dapat membebani anggaran daerah (Setiawan et al., 2024). Selain itu, manajemen aset yang baik juga berhubungan erat dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik (Maharani et al., 2020; Yassir et al., 2022).

Keamanan aset daerah juga merupakan faktor kunci dalam menjaga nilai dan keberlanjutan aset publik (Vlasova et al., 2022). Aset-aset strategis seperti tanah, bangunan, dan infrastruktur mendukung pembangunan daerah (Astuti, 2023). Di kawasan perkotaan, risiko pencurian, bencana alam, atau perusakan dapat mengancam keberlanjutan layanan publik dan infrastruktur (Simorangkir, 2022). Lebih jauh lagi, keamanan aset berkaitan dengan kelangsungan ekonomi daerah (Devita & Aslami, 2022). Kerugian atau kerusakan aset dapat mempengaruhi anggaran daerah dan membatasi kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas (Sudrajat, 2021). Oleh karena itu, pentingnya

menjaga keamanan aset daerah tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek ekonomi dan keberlanjutan pembangunan daerah (Caron & Markusen, 2024). Dalam era revolusi industri 4.0, pemerintah diharapkan proaktif dalam melakukan perencanaan, penganggaran, serta pelaporan yang transparan dan akuntabel (Di Harjo & Desfina, 2024). Ini sejalan dengan peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memastikan serta memberikan konsultasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah (Kuntadi, 2023).

Salah satu tonggak penting dalam reformasi manajemen pemerintahan adalah diberlakukannya undang-undang keuangan negara, termasuk UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Keuangan Negara. Semangat reformasi ini tercermin dalam prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang menekankan tata kelola yang baik, seperti Akuntabilitas Berbasis Hasil dan transparansi (Ospina et al., 2021). Untuk mendukung kinerja administrasi pemerintah daerah dalam mengamankan aset, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah memanfaatkan aplikasi SIMDABMD yang dikelola oleh BPKAD. Aplikasi ini menyediakan pengkodean barang serta menghasilkan informasi detail terkait barang milik daerah, seperti jenis barang, kode lokasi, tanggal pembukuan, tanggal perolehan, harga perolehan, hingga asal barang Namun, terdapat beberapa kendala yang muncul dalam administrasi aset daerah menggunakan aplikasi ini (Fadillah et al., 2024), di antaranya:

1. Terjadinya kesalahan administrasi yang disebabkan oleh kurangnya ketelitian dalam proses input data aset.
2. Ketidakterpaduan antara aplikasi SIMDABMD dengan sistem pelaporan keuangan yang dikelola oleh Bagian Akuntansi.
3. Banyaknya aset daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal serta tidak direncanakan penggunaannya dengan baik.

Aplikasi SIMDABMD, yang berbasis desktop, dikembangkan untuk mendukung pemerintah daerah dalam pengelolaan aset. Aplikasi ini memiliki berbagai fungsi yang mencakup tahapan mulai dari perencanaan, pengadaan, administrasi, hingga akuntansi aset. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Ilir, sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memikul kewajiban untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien sebagai wujud akuntabilitas publik. Meskipun demikian, penerapan aplikasi SIMDABMD menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan solusi.

Berdasarkan berbagai masalah dan tantangan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta relevansinya terhadap pengembangan e-government di Kabupaten Ogan Ilir.

METODE

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau fenomena tertentu melalui interpretasi subyektif dari pengalaman individu maupun kelompok. Salah satu metode yang sering diterapkan dalam penelitian kualitatif adalah tinjauan literatur, yang berfokus pada evaluasi dan sintesis berbagai penelitian sebelumnya terkait topik tertentu. Metode ini sangat penting dalam merumuskan kerangka teori, menemukan kesenjangan penelitian, serta mengidentifikasi tren dalam penelitian terdahulu.

Dalam penelitian kualitatif, tinjauan literatur tidak hanya meninjau karya-karya sebelumnya, tetapi juga melakukan analisis yang mendalam dan reflektif terhadap sumber-sumber tersebut. Peneliti berusaha memetakan pengetahuan yang ada untuk merumuskan konsep baru atau memperkuat teori yang sudah ada. Menurut Creswell (2014), tujuan utama

dari tinjauan literatur adalah memberikan konteks bagi penelitian yang sedang dilakukan, dengan cara menelaah literatur terdahulu serta mengidentifikasi kesenjangan yang dapat diisi oleh penelitian yang sedang dilakukan. Tahapan dalam melakukan penelitian kualitatif dengan metode tinjauan literatur meliputi:

- 1. Identifikasi Topik Penelitian:** Langkah awal adalah menentukan secara jelas topik yang akan dikaji. Pada tahap ini, perumusan pertanyaan penelitian yang spesifik sangat penting agar pencarian literatur menjadi lebih terarah.
- 2. Pencarian dan Pengumpulan Literatur:** Setelah topik ditentukan, peneliti perlu mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, baik dari jurnal ilmiah, buku, maupun sumber-sumber lain yang terverifikasi secara akademis. Menurut Sugiyono (2016), penggunaan berbagai sumber yang kredibel akan memperkuat landasan penelitian literatur review.
- 3. Kategorisasi dan Evaluasi Sumber:** Setelah literatur terkumpul, peneliti mengategorikan sumber-sumber tersebut berdasarkan tema, teori, atau model yang relevan. Evaluasi terhadap literatur dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keandalan sumber (Dey, 2003).
- 4. Analisis dan Sintesis:** Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis kritis terhadap literatur yang sudah dikumpulkan. Sintesis ini penting untuk memahami hubungan antar-penelitian, menemukan pola-pola yang muncul, atau menjelaskan perbedaan pandangan di antara penelitian terdahulu (Merriam, 2009). Teknik seperti coding atau pengelompokan tema umum sering digunakan untuk mengorganisasikan hasil analisis.
- 5. Penulisan Literatur Review:** Hasil dari analisis dan sintesis tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang sistematis. Penulisan tinjauan literatur harus disertai dengan penjelasan mengenai kontribusi penelitian sebelumnya serta bagaimana penelitian yang sedang dilakukan dapat memperkaya pemahaman terhadap topik yang diteliti (Creswell, 2014).

Dengan demikian, tinjauan literatur yang komprehensif berfungsi sebagai landasan penting dalam penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi kontribusi baru yang dapat diberikan oleh penelitian yang sedang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan aset pemerintah daerah yang kerap menghadapi berbagai kendala, terutama sebelum implementasi teknologi informasi berbasis e-government. Perkembangan e-government di Indonesia telah memberikan dampak signifikan di berbagai sektor pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan BMD, dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menjadi salah satu sistem utama yang mendorong digitalisasi proses tersebut. Sebelum adopsi e-government melalui SIMDA, pengelolaan BMD di banyak daerah di Indonesia umumnya masih dilakukan secara manual. Pendekatan ini menyebabkan berbagai permasalahan, di antaranya:

- 1. Ketidakakuratan Data:** Pencatatan secara manual sering kali menghasilkan data yang tidak akurat terkait inventarisasi aset daerah (Setiawan & Purnomo, 2020).
- 2. Rendahnya Transparansi:** Minimnya penggunaan sistem digital menghambat pengawasan aset daerah secara transparan dan efisien (Widodo, 2021).
- 3. Pengawasan yang Kurang Efektif:** Tidak adanya integrasi antara pengelolaan aset dengan sistem pengawasan atau audit menyebabkan sering terjadinya penyalahgunaan aset yang tidak terdeteksi secara dini (Haris & Kusumaningtyas, 2019).

Banyak pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Ogan Ilir, mengalami kesulitan dalam memperbarui data aset secara rutin, sehingga laporan aset yang disusun sering kali tidak mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Selain itu, pengelolaan aset yang masih

bersifat manual memperlambat proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dan pemeliharaan aset.

Pengembangan e-government dan penerapannya melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMDA BMD) memberikan berbagai manfaat penting bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Ogan Ilir, khususnya dalam pengelolaan keuangan, aset, dan administrasi. Beberapa manfaat utama dari implementasi SIMDA BMD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Penerapan SIMDA BMD memberikan dampak signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data aset daerah secara elektronik, sehingga pelaporan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Penelitian Widiastuti (2020) menunjukkan bahwa SIMDA BMD telah memperkuat pengawasan aset di beberapa kabupaten melalui integritas data yang lebih baik dan pencatatan yang lebih aman. Di Kabupaten Ogan Ilir, penerapan SIMDA BMD mengurangi risiko manipulasi data dan memudahkan akses informasi bagi pemangku kepentingan (Santoso, 2021).

Selain itu, transparansi dalam laporan aset yang dihasilkan oleh sistem ini turut meningkatkan kualitas audit. Rahman (2019) mengungkapkan bahwa audit internal dan eksternal dapat dilakukan dengan lebih efisien karena adanya dokumentasi terintegrasi yang mudah diakses, sehingga mengurangi potensi korupsi dan kesalahan manusia.

2. Efisiensi Operasional dalam Pengelolaan Aset

SIMDA BMD juga meningkatkan efisiensi operasional dalam pengelolaan aset daerah dengan mengurangi beban administrasi manual yang rawan kesalahan. Pratama (2020) melaporkan bahwa penerapan SIMDA BMD di berbagai daerah telah mempercepat proses inventarisasi aset hingga 40% dibandingkan metode konvensional. Di Kabupaten Sleman, sistem ini telah membantu optimalisasi distribusi dan pengelolaan aset, mempercepat pelaporan, serta meningkatkan akurasi data (Kusuma, 2021).

Selain itu, SIMDA BMD memfasilitasi integrasi data aset dengan sistem keuangan daerah lainnya, yang mendukung sinkronisasi antar-dinas dan mengurangi redundansi data (Sari, 2021). Hal ini sangat penting dalam menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan komprehensif.

3. Optimalisasi Penggunaan Aset

Sistem ini membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan aset dengan menyediakan informasi real-time mengenai status, kondisi, dan lokasi aset. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Penelitian Setiawan (2022) menunjukkan bahwa penerapan SIMDA BMD di Kabupaten Bantul berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan aset hingga 25%, dengan redistribusi aset yang lebih terarah dan optimal.

Sistem ini juga memudahkan pemerintah daerah dalam merencanakan kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan aset, memungkinkan alokasi anggaran yang lebih efisien. Di Kabupaten Ogan Ilir, SIMDA BMD membantu penjadwalan pemeliharaan yang lebih teratur, sehingga dapat mengurangi biaya tak terduga akibat kerusakan aset yang tidak terdeteksi sebelumnya (Hidayat, 2021).

4. Kemudahan dalam Pengambilan Keputusan

SIMDA BMD memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset dengan menyediakan data yang akurat dan dapat

diakses secara digital. Sugiarto (2020) mengungkapkan bahwa daerah yang menggunakan SIMDA BMD mampu menyusun rencana strategis pengelolaan aset yang lebih akurat berdasarkan data historis, sehingga mengurangi pembelian aset yang tidak diperlukan.

Selain itu, data yang tersedia secara real-time juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat di tingkat pimpinan, mengurangi waktu tunggu untuk memperoleh informasi aset yang dibutuhkan dalam rapat-rapat strategis (Wahyuni, 2019).

5. Penguatan Implementasi *e-Government*

SIMDA BMD merupakan bagian integral dari pengembangan e-government yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Di Kabupaten Ogan Ilir, penerapan SIMDA BMD sejalan dengan kebijakan nasional untuk memperkuat e-government, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan pemerintah. Iskandar (2020) mencatat bahwa SIMDA BMD adalah langkah penting menuju pemerintahan berbasis digital, yang memperkuat kolaborasi antar unit kerja terkait pengelolaan aset.

Selain itu, sistem ini juga mendukung integrasi dengan aplikasi pengelolaan keuangan lainnya, seperti SIMDA Keuangan, yang membantu pelaporan lebih efisien dan transparan (Gunawan, 2021).

6. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Dengan penerapan SIMDA BMD, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan publik terkait pengelolaan aset. Transparansi dalam penggunaan aset memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa aset daerah dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik. Susanto (2021) menyatakan bahwa SIMDA BMD di Kabupaten Magelang berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan aset daerah, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas layanan publik.

Sistem yang terintegrasi dan transparan memungkinkan masyarakat mengakses informasi terkait penggunaan aset publik dengan lebih mudah, yang meningkatkan keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat (Maulana, 2021).

7. Penghematan Biaya dan Sumber Daya

SIMDA BMD juga menghasilkan penghematan signifikan, baik dalam hal waktu, tenaga, maupun anggaran. Sistem ini mengurangi biaya terkait inventarisasi, pemeliharaan, dan pembelian aset baru yang sebenarnya tidak diperlukan. Putra (2022) menemukan bahwa penghematan biaya operasional terkait pengelolaan aset dengan SIMDA BMD dapat mencapai 15% per tahun.

Di Kabupaten Ogan Ilir, implementasi SIMDA BMD berhasil mengurangi kebutuhan perangkat keras untuk pencatatan manual dan mengurangi risiko penyalahgunaan aset (Fauzi, 2020).

Penerapan SIMDA BMD dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam administrasi serta pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi manajemen anggaran, proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi anggaran dapat diotomatisasi. Hal ini mengurangi potensi kesalahan manusia, mempercepat alur kerja, serta meningkatkan akurasi dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Penggunaan aplikasi SIMDA BMD dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah memungkinkan peningkatan efisiensi administrasi dan manajemen. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diotomatisasi, sehingga mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses pelaksanaan anggaran serta pelaporan keuangan. Peningkatan efisiensi operasional ini berdampak pada pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal serta pengambilan keputusan yang lebih baik dalam

pengelolaan keuangan daerah. SIMDA BMD menjadi alat yang efektif bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Implementasi *e-government* melalui SIMDABMD di Kabupaten Ogan Ilir memang dapat memberikan dampak positif dalam hal pengelolaan keuangan, asset, dan administrasi pemerintahan daerah. Namun, disaat yang sama system ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang dapat memengaruhi efektivitasnya atau bahkan menimbulkan problematika baru dalam proses pelaksanaan manajemen berlangsung. Gambar 4 menampilkan beberapa kendala yang mungkin dihadapi.

Dinyatakan bahwa faktor manajerial dan keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi penggunaan aplikasi SIMDA BMD. Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan SIMDABMD adalah investasi pada perangkat keras, sistem perangkat lunak, dan jaringan komunikasi. Anggaran negara merupakan indikator ekonomi yang memengaruhi implementasi proyek *e-government*. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk satu tahun, yang menghambat adopsi proyek *e-government* jangka panjang yang memerlukan biaya tinggi. Di negara maju, investasi terkait implementasi *e-government* sering kali didanai bersama oleh beberapa lembaga pendanaan yang didukung negara maju lainnya, memungkinkan dan memudahkan implementasi *e-government*.

Tingkat infrastruktur teknologi juga mempengaruhi implementasi SIMDABMD. Infrastruktur teknologi yang terbatas, konektivitas internet, dan kapasitas komunikasi (Febriyanti et al., 2023) menjadi hambatan bagi adopsi dan implementasi. Kesiapan untuk koneksi internet yang stabil merupakan faktor penting dan pendorong utama (Cruz-Cárdenas et al., 2021) dalam penggunaan aplikasi SIMDABMD, terutama jika sistem berbasis web atau cloud. Janssen et al., (2018) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kualitas informasi yang dimiliki pemerintah dan efektivitas tata kelola. Kompatibilitas teknologi sistem juga terbukti menjadi faktor penting karena mempengaruhi berbagi informasi dan konektivitas sistem di seluruh pemerintahan (Abdulkareem & Mohd Ramli, 2022). Masalah konektivitas dapat mengganggu operasional di daerah terpencil. Kompatibilitas perangkat, perangkat keras yang tidak memadai, atau perangkat lunak yang usang dapat menghambat kelancaran operasi SIMDA (Javed et al., 2023).

Keterbatasan dalam keamanan data tetap menjadi masalah kritis (Karankar & Seth, 2023). Risiko keamanan mengacu pada perlindungan yang tepat terkait informasi sistem digital (Landoll, 2021). Kerahasiaan menjadi faktor penting dalam penggunaan SIMDA BMD (Strupczewski, 2021). SIMDA rentan terhadap ancaman dunia maya seperti peretasan, malware, dan pencurian data. Pemerintah daerah harus memastikan langkah-langkah keamanan yang memadai diterapkan (Duggineni, 2023). Perlindungan privasi dalam manajemen data sensitif membutuhkan protokol keamanan yang ketat untuk melindungi privasi informasi (Taherdoost, 2022). Pemerintah menyediakan keamanan data dan keuangan yang dikumpulkan untuk meningkatkan kepercayaan publik (Amaglobeli et al., 2023). Keamanan melibatkan mekanisme pencegahan yang diperkenalkan terkait informasi dan sistem, yang bertujuan untuk mencegah pengungkapan akses ilegal, perubahan ilegal, penghancuran data pribadi, atau perlindungan terhadap virus dan worm. Masalah privasi dan keamanan harus ditangani dengan baik.

Terdapat ketergantungan pada penyedia layanan dan proses yang bergantung pada pihak ketiga. Beberapa tugas dilakukan oleh vendor eksternal. Yang lain terintegrasi ke dalam sistem dan memerlukan kerjasama dengan departemen yang berbeda. Beberapa tugas bergantung pada kontribusi sukarelawan, yang biasanya bergantung pada kerjasama atau departemen yang membutuhkan layanan tersebut. Banyaknya aktor yang relatif independen membuat kontrol tugas menjadi sulit dan menimbulkan ketergantungan. Kontrol tugas semakin terancam oleh perubahan alokasi tugas seiring waktu. Outsourcing biasanya terjadi

karena perubahan kepemimpinan politik. Vendor dapat dipilih untuk menggantikan vendor saat ini. Keputusan terkait penggunaan vendor dalam produksi layanan bersifat sensitif secara politik dan tidak diserahkan kepada kepala departemen individu. Jika layanan yang disediakan pihak ketiga memadai, operasi sistem dapat terlindungi.

Terlepas dari segala hambatan dan manfaat yang muncul dengan mengembangkan implementasi e-government melalui SIMDABMD di berbagai daerah di Indonesia, khususnya Kabupaten Ogan Ilir, harus tetap dikembangkan untuk meminimalisir hambatan yang muncul, serta mengoptimalkan output dari implementasi secara keseluruhan. Pengembangan SIMDA dan e-government di masa depan perlu difokuskan pada peningkatan integrasi antar sistem serta penggunaan teknologi baru seperti blockchain dan artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan keamanan dan keakuratan data. BPKP sebagai pengembang SIMDA telah merancang sistem ini agar dapat diintegrasikan lebih luas dengan sistem keuangan dan audit daerah, sehingga menciptakan ekosistem pengelolaan aset yang lebih komprehensif dan akuntabel (BPKP, 2022). Selain itu, perlu adanya peningkatan literasi teknologi di kalangan pegawai pemerintah daerah untuk memastikan keberhasilan implementasi jangka panjang, serta penguatan regulasi yang mendukung digitalisasi di sektor publik.

KESIMPULAN

Pengembangan *e-government* dan implementasi SIMDABMD dalam proses manajemen aset di Pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya Kabupaten Ogan Ilir memberikan dampak positif yang cukup signifikan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. Namun, dikarenakan belum matangnya sarana, pra-sarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM) selaku organisme pelaksana *e-government* yang telah ada, menyebabkan timbulnya limitasi dan belum maksimalnya proses implementasi SIMDABMD secara keseluruhan. Semua keterbatasan yang muncul harus menjadi prioritas untuk diselesaikan demi tata kelola aplikasi SIMDABMD yang lebih optimal. Selain itu, dukungan kebijakan dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan diperlukan, termasuk pengembangan kerja sama antar organisasi sebagai elemen penting dalam kapasitas organisasi serta peningkatan kinerja organisasi BPKAD Ogan Ilir untuk menjaga keunggulan kompetitif. Penulis mengusulkan untuk membuat suatu prosedur *step by step* untuk memperkenalkan SIMDABMD baik kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Meskipun teridentifikasi banyak kendala, penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi SIMDABMD sangat berpotensi untuk memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah daerah dalam jangka panjang, terutama dalam hal peningkatan kepuasan dan produktivitas pengguna aplikasi SIMDABMD. Seiring dengan berkembangannya *e-government* dan SIMDABMD di Kabupaten Ogan Ilir, pemerintah daerah wajib memberikan pelatihan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna mengembangkan kompetensi organ pelaksana, meningkatkan sarana dan pra-sarana terkait *e-government*, serta mengedukasi masyarakat terkait system itu sendiri guna meminimalisir terjadi *human error* dan problematika lainnya yang dapat muncul dalam proses manajemen aset daerah.

REFERENSI

- Abdulkareem, A. K., & Mohd Ramli, R. (2022). Does trust in e-government influence the performance of e-government? An integration of information system success model and public value theory. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 16(1), 1–17. <https://doi.org/10.1108/TG-01-2021-0001>
- Achmad, W. (2021). Citizen and netizen society: the meaning of social change from a technology point of view. *Jurnal Mantik*, 5(3), 1564–1570.

- Adam, N., & Thalib, M. K. (2022). PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 5(1), 27–36.
- Agarwal, R., & Sambamurthy, V. (2020). Principles and models for organizing the IT function. In *Strategic information management* (pp. 243–260). Routledge.
- Ali, R. R., Karamoy, H., & Warongan, J. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2).
- Amaglobeli, D., de Mooij, R. A., Mengistu, A., Moszoro, M., Nose, M., Nunhuck, S., Pattanayak, S., Paso, D. L. R., Solomon, F., Sparkman, M. R., & Tourpe, H. (2023). *Transforming Public Finance through GovTech*.
- Androniceanu, A. (2021). Transparency in public administration as a challenge for a good democratic governance. *Revista» Administratie Si Management Public «(RAMP)*, 36, 149–164.
- Ariyanto, D., Dewi, A. A., Hasibuan, H. T., & Paramadani, R. B. (2022). The Success of Information Systems and Sustainable Information Society: Measuring the Implementation of a Village Financial System. *Sustainability (Switzerland)*, 14(7). <https://doi.org/10.3390/su14073851>
- Asianto, A., & Firmansyah, G. (2022). The design of Indonesia e-Government (SPBE) governance in Tangerang City. *First Mandalika International Multi-Conference on Science and Engineering 2022, MIMSE 2022 (Informatics and Computer Science)(MIMSE-IC-2022)*, 22–34.
- Astuti, Z. F. (2023). Analisis Efektivitas Pemanfaatan BMD untuk Meningkatkan PAD (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta).
- Azeem, M., Ahmed, M., Haider, S., & Sajjad, M. (2021). Expanding competitive advantage through organizational culture, knowledge sharing and organizational innovation. *Technology in Society*, 66, 101635.
- Banafaa, M., Shayea, I., Din, J., Azmi, M. H., Alashbi, A., Daradkeh, Y. I., & Alhammadi, A. (2023). 6G mobile communication technology: Requirements, targets, applications, challenges, advantages, and opportunities. *Alexandria Engineering Journal*, 64, 245–274.
- Bandy, G. (2023). *Financial management and accounting in the public sector*. Routledge.
- Belyakova, O. V. (2021). Digital transformation of public administration: achievements and problems. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*.
- BPKP. (2022). *Laporan Pengembangan SIMDA: Aset dan Keuangan Daerah*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Caldera, S., Mostafa, S., Desha, C., & Mohamed, S. (2021). Exploring the role of digital infrastructure asset management tools for resilient linear infrastructure outcomes in cities and towns: A systematic literature review. *Sustainability*, 13(21), 11965.
- Caron, J., & Markusen, J. R. (2024). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset DAERAH. *JOURNAL SYNTAX IDEA*, 6(04), 1–23.
- Chege, S. M., Wang, D., & Suntu, S. L. (2020). Impact of information technology innovation on firm performance in Kenya. *Information Technology for Development*, 26(2), 316–345.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Cruz-Cárdenas, J., Guadalupe-Lanas, J., Ramos-Galarza, C., & Palacio-Fierro, A. (2021). Drivers of technology readiness and motivations for consumption in explaining the tendency of consumers to use technology-based services. *Journal of Business Research*, 122(June 2020), 217–225. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.08.054>

- Devita, M., & Aslami, N. (2022). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu. *Journal of Social Research*, 1(11), 144–149.
- Dey, I. (2003). *Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientists*. Routledge.
- Di Harjo, F. F., & Desfina, D. (2024). Analisis Penerapan Aplikasi SIMDA BMD Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pegawai Guna Memaksimalkan Pemanfaatan Aset Daerah: Studi Kasus BKAD Kabupaten Bintan. *Repeater: Publikasi Teknik Informatika Dan Jaringan*, 2(2), 20–26.
- Duggineni, S. (2023). Impact of Controls on Data Integrity and Information Systems. *Science and Technology*, 2023(2), 29–35. <https://doi.org/10.5923/j.scit.20231302.04>
- Fadillah, F., Harjo, D., Raja, M., Haji, A., Pinang, T., & Maritim Raja, U. (2024). Analisis Penerapan Aplikasi SIMDA BMD Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pegawai Guna Memaksimalkan Pemanfaatan Aset Daerah (Studi Kasus BKAD Kabupaten Bintan). *Publikasi Teknik Informatika Dan Jaringan*, 2(2), 20–26.
- Fauzan, F. & Desfina, D. (2024). Analisis Penerapan Aplikasi SIMDA BMD dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pegawai Guna Memaksimalkan Pemanfaatan Aset Daerah. *Repeater: Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan*, 2(2), 20–26.
- Fauzi, R. (2020). Efisiensi Pengelolaan Aset Daerah melalui SIMDA BMD. *Jurnal Keuangan Daerah*, 7(3), 45-56.
- Febrianti, P., Nurwani, N., & Nurlaila, N. (2023). Analysis Of Regional Fixed Asset Management At The Regional Financial And Asset Management Agency In Medan. *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*, 7(1), 289–294.
- Febriyanti, D., Widianingsih, I., Sumaryana, A., & Buchari, R. A. (2023). Information Communication Technology (ICT) on Palembang city government, Indonesia: Performance measurement for great digital governance. *Cogent Social Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2269710>
- Firdausy, C. M. (2018). Potential financial instruments toward sustainable urban infrastructural development in Indonesia. *International Journal of Critical Infrastructures*, 14(4), 295–310.
- Firmansyah, A., Wibowo, P., & Puspitarini, I. (2020). Implementation of accrual based accounting on regional property in Indonesia: competence employees and organizational commitments perspective. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(7), 9502–9512.
- Fridberg, H., Wallin, L., & Tistad, M. (2021). The innovation characteristics of person-centred care as perceived by healthcare professionals: an interview study employing a deductive-inductive content analysis guided by the consolidated framework for implementation research. *BMC Health Services Research*, 21, 1–13.
- Gavrikova, E., Volkova, I., & Burda, Y. (2020). Strategic aspects of asset management: An overview of current research. *Sustainability*, 12(15), 5955.
- Gunawan, T. (2021). Integrasi SIMDA BMD dengan SIMDA Keuangan: Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Teknologi Informasi Pemerintahan*, 9(2), 88-101.
- Haris, M., & Kusumaningtyas, D. (2019). Efisiensi Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 145-160.
- He, W., Zhang, Z. J., & Li, W. (2021). Information technology solutions, challenges, and suggestions for tackling the COVID-19 pandemic. *International Journal of Information Management*, 57, 102287.

- Heeks, R. (2006). *Implementing and Managing eGovernment: An International Text*. SAGE Publications.
- Hidayat, M. (2021). Perencanaan dan Pengelolaan Aset Daerah dengan SIMDA BMD. *Jurnal Manajemen Aset Daerah*, 11(1), 34-49.
- Igirisa, I., Sartika, D., Ilato, R., & Kamuli, S. (2022). Implementation of Local Management Information System (SIMDA) in Quality Improvement of Financial Report of Buol Regencial Government. *British Journal of Philosophy, Sociology and History*, 2(1), 35–39.
- Ishak, J. F., Sarinawati, T., Amaliyah, F., & Ardhi, K. F. (2022). The Effect of Administration and Supervision to Security of Local-Owned Assets. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 15–21.
- Iskandar, Z. (2020). Peran SIMDA BMD dalam Penguatan e-Government. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintah Daerah*, 6(2), 112-124.
- Jannah, H. P. N., & Widjajaatmadja, D. A. R. (2021). Legal Protection of State Ownership of Land and Buildings Functioned for Public Interest Due to Laws of Other Parties. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(1), 1–10.
- Janssen, M., Rana, N. P., Slade, E. L., & Dwivedi, Y. K. (2018). Trustworthiness of digital government services: deriving a comprehensive theory through interpretive structural modelling. *Public Management Review*, 20(5), 647–671. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1305689>
- Javed, A. R., Zikria, Y. Bin, Rehman ur, S., Shahzad, F., & Jalil, Z. (2023). Future smart cities: Requirements, emerging technologies, applications, challenges, and future aspects. *Cities*, 129, 103794. https://d197for5662m48.cloudfront.net/documents/publicationstatus/160595/preprint_pdf/6fe7c3c87ff581dc48eeb274cd96c891.pdf
- Jia, M., Xu, Y., He, P., & Zhao, L. (2022). Identifying critical factors that affect the application of information technology in construction management: A case study of China. *Frontiers of Engineering Management*, 1–16.
- John Wiley & Sons. Rainer, R. K., Prince, B., Sanchez-Rodriguez, C., Spletstoesser-Hogeterp, I., & Ebrahimi, S. (2020). Introduction to information systems.
- John Wiley & Sons. Ramos, C., Milanese, A., & Ibarra, D. G. (2021). Public administration in Uruguay: Modernization in slow motion. In *The Emerald handbook of public administration in Latin America* (pp. 229–258). Emerald Publishing Limited.
- Kahfi, Z., Safitri, A. S. I., Nurhasanah, A., & Azhari, S. R. I. (2023). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar. *YUME: Journal of Management*, 6(1), 323–335.
- Karanam, S. D., Kamath, R. S., Kulkarni, R. V. R., & Pai, B. (2021). Big data integration solutions in organizations: A domain-specific analysis. *Data Integrity and Quality*, 1–31.
- Karankar, N., & Seth, A. (2023). A Comprehensive Survey on Internet of Things Security: Challenges and Solutions. *Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies*, 166, 711–728. https://doi.org/10.1007/978-981-99-0835-6_51
- Khine, P. K., Mi, J., & Shahid, R. (2021). A comparative analysis of co-production in public services. *Sustainability*, 13(12), 6730.
- Kuntadi, C. (2023). *Audit Internal Sektor Publik*. Penerbit Salemba.
- Kusuma, D. (2021). Studi Kasus: Implementasi SIMDA BMD di Kabupaten Sleman. *Jurnal Manajemen Publik*, 8(3), 77-89.
- Landoll, D. J. (2021). *The Security Risk Assessment Handbook A Complete Guide for Performing Security Risk Assessments* (3rd ed., Issue 112). CRS press.

- <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781003090441/securityrisk-assessment-handbook-douglas-landoll>
- Leyva-Vázquez, M., Quiroz-Martínez, M. A., Portilla-Castell, Y., Hechavarría-Hernández, J. R., & González-Caballero, E. (2023). A new model for the selection of information technology project in a neutrosophic environment. *And Their Impact on Research in Latin America*, 62, 343.
- Lutfi, A. (2022). Factors influencing the continuance intention to use accounting information system in Jordanian SMEs from the perspectives of UTAUT: Top management support and self-efficacy as predictor factors. *Economies*, 10(4), 75.
- Magalhaes, G., & Roseira, C. (2020). Open government data and the private sector: An empirical view on business models and value creation. *Government Information Quarterly*, 37(3), 101248.
- Maharani, R. A., Utoyo, B., & Sulistio, E. B. (2020). Manajemen Aset Pemerintah Daerah (Studi Tentang Manajemen Aset Kendaraan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(3), 383–392.
- Marchiori, D. M., Rodrigues, R. G., Popadiuk, S., & Mainardes, E. W. (2022). The relationship between human capital, information technology capability, innovativeness and organizational performance: An integrated approach. *Technological Forecasting and Social Change*, 177, 121526.
- Maulana, H. (2021). Transparansi Pengelolaan Aset Melalui SIMDA BMD di Pemerintah Daerah. *Jurnal Tata Kelola Pemerintah*, 12(1), 56-68.
- McQuiston, J., & Manoharan, A. P. (2021). E-Government and information technology coursework in public administration programs in Asia. *Teaching Public Administration*, 39(2), 210–226. <https://doi.org/10.1177/0144739420978249>
- Mergel, I. (2021). Open innovation in the public sector: drivers and barriers for the adoption of Challenge. gov. In *Digital Government and Public Management* (pp. 94–113). Routledge.
- Merriam, S. B. (2009). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. Jossey-Bass.
- Migdadi, M. M. (2022). Knowledge management processes, innovation capability and organizational performance. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 71(1), 182–210.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook* (Third Edit). Sage Publications. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-data-analysis-a-methods-sourcebook-e183985418.html>
- Ndou, V. (2004). E-Government for Developing Countries: Opportunities and Challenges. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 18(1), 1-24.
- Nordhaus, W. D. (2021). Are we approaching an economic singularity? information technology and the future of economic growth. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(1), 299–332.
- Nuryati, T., Pratama, B., & Refina, P. (2020). Improving the Quality of Financial Reports by Implementing SIMAK-BMN in KPU-RI. *Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2019)*, 157–161.
- Ospina, S. M., Cunill-Grau, N., & Maldonado, C. (2021). Enhancing accountability through results-oriented monitoring and evaluation systems. In *The Emerald Handbook of Public Administration in Latin America* (pp. 437–473). Emerald Publishing Limited.
- Pahludin. 2020. *Globalisasi dan Kebijakan Publik, Kajian Seputar Peranan Pemerintah Mewujudkan Kesejahteraan di Tengah Dunia Tak Bersekat*. Jakarta: Kencana

- Pandey, R., & Kumar, V. (2020). Exploring the Impediments to digitization and digital preservation of cultural heritage resources: A selective review. *Preservation, Digital Technology & Culture*, 49(1), 26–37.
- Pearlson, K. E., Saunders, C. S., & Galletta, D. F. (2024). Managing and using information systems: A strategic approach.
- Pratama, A. (2020). Pengelolaan Aset Daerah yang Lebih Efisien dengan SIMDA BMD. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(2), 102-115.
- Putra, A. (2022). Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pengelolaan Aset Daerah dengan SIMDA BMD. *Jurnal Pengelolaan Aset Publik*, 13(3), 120-133.
- Rahman, T. (2019). Pengaruh SIMDA BMD terhadap Audit Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 6(2), 88-99.
- Ribeiro, H., Barbosa, B., Moreira, A., & Rodrigues, R. G. (2022). Churn in services-A bibliometric review. *Management Letters/Cuadernos de Gestión*.
- Santoso, T. (2020). Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah untuk Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas. *Jurnal Manajemen Pemerintahan Daerah*, 6(4), 27-36.
- Santoso, Y. (2021). Meningkatkan Transparansi Aset melalui SIMDA BMD. *Jurnal Sistem Informasi Daerah*, 11(1), 67-80.
- Sari, M. (2021). Integrasi SIMDA BMD dalam Pengelolaan Aset di Pemerintah Daerah. *Jurnal Sistem Informasi*, 10(2), 123-137.
- Schwartz, M. G., Fouad, M. M., Hansen, M. T. S., & Verdier, M. G. (2020). Well spent: how strong infrastructure governance can end waste in public investment. International Monetary Fund.
- Setiawan, A. (2022). Pengaruh SIMDA BMD terhadap Optimalisasi Penggunaan Aset di Kabupaten Bantul. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 9(3), 134-149.
- Setiawan, E., & Purnomo, T. (2020). Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah di Era Digital. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(3), 98-115.
- Setiawan, Z., Judijanto, L., Azizah, I. S., Heirunissa, H., Islami, V., Suprayitno, D., Badriawan, A. S., Putra, M. F. M., Widyastuti, T. A. R., & Andrayanti, I. (2024). Pengantar Administrasi Bisnis: Teori Komprehensif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Simorangkir, W. (2022). Analisa Dan Evaluasi Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Serta Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Price: Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(01), 29–35.
- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1735690.
- Strupczewski, G. (2021). Defining cyber risk. *Safety Science*, 135(October 2020). <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.105143>
- Sudrajat, A. R. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Publik: Bagaimana Engaruh Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah Di Kabupaten Sumedang. *Repository FISIP UNSAP*, 21(1).
- Sugiarto, D. (2020). SIMDA BMD sebagai Alat Pengambilan Keputusan dalam Pengelolaan Aset. *Jurnal Manajemen Pemerintah Daerah*, 15(2), 77-89.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Susanto, R. (2021). Peningkatan Kualitas Layanan Publik melalui Pengelolaan Aset yang Transparan. *Jurnal Manajemen Publik*, 9(4), 112-125.
- Swedberg, R. (2020). Exploratory research. *The Production of Knowledge: Enhancing Progress in Social Science*, 2(1), 17–41.

- Taherdoost, H. (2022). Understanding Cybersecurity Frameworks and Information Security Standards—A Review and Comprehensive Overview. *Electronics (Switzerland)*, 11(14). <https://doi.org/10.3390/electronics11142181>
- Valle-Cruz, D., Fernandez-Cortez, V., & Gil-Garcia, J. R. (2022). From E-budgeting to smart budgeting: Exploring the potential of artificial intelligence in government decision-making for resource allocation. *Government Information Quarterly*, 39(2), 101644.
- Vlasova, O. M., Gorelov, B. B., Korzhueva, L. M., & Postnikova, L. V. (2022). State Regulation of Intangible Assets and Their Recognition in Accounting Based on the New Public Sector Standard. In *Digital Technologies and Institutions for Sustainable Development* (pp. 587–592).
- Wahyuni, T. (2019). Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pengambilan Keputusan. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 8(1), 44-57.
- Widiastuti, A. (2020). Pengaruh Digitalisasi Aset Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 7(3), 88-102.
- Widodo, S. (2021). Transformasi Pengelolaan Aset Daerah Melalui E-Government: Studi Kasus Implementasi SIMDA di Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Pemerintahan Daerah*, 15(1), 22-35.
- Widowati, W., Sakir, A., & Malta, M. (2021). Analysis of Supporting and Inhibiting Factors in the Implementation of Financial SIMDA. *Ilomata International Journal of Social Science*, 2(4), 222–232.
- Yassir, Y., Mursalim, M., & Junaid, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 477–494.
- Yildiz, M. (2007). E-Government Research: Reviewing the Literature, Limitations, and Ways Forward. *Government Information Quarterly*, 24(3), 646-665.
- Yin, R. K. (2016). *Yin 2016 Qualitative Research from Start to Finish*.
- Yuesti, A., Adnyana, I. M. D., & Pramesti, I. G. A. A. (2022). Management information systems and the quality of financial statements in local government. *Journal of Public Affairs*, 22(3), e2462.
- Yunita, N., Noor, I., & Suherman, A. (2023). The Effect of the Implementation of Regional Financial Management Information System (SIMDA) and Human Resource Competence on the Quality of Financial Reports (Case Study On Regional Work Units In Sukabumi Regency). *Journal of Management, Economic, and Accounting*, 2(2), 201–212.
- Yusranda, Y., Khoirina, S., Yunindra, A. E., & WA, S. M. (2024). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kecamatan Natar. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 5(2).
- Zamdedy, Z. (2024). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah. *Syntax Idea*, 6(4), 1545–1553